

'ASHABIYAH IBNU KHALDUN DAN RELEVANSINYA DENGAN NASIONALISME DI INDONESIA

Hanna Widayani

Program Studi Filsafat Agama Pascasarjana IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah, Kel. Pagar Dewa, Kota Bengkulu, 56144
Email: hannawidayani28@gmail.com

Abstract: The problem in this research is how 'Ashabiyah Ibn Khaldun and how' ashabiyah Ibn Khaldun and its relevance to nationalism in Indonesia. The purpose of this research is to describe the concept of 'Ashabiyah Ibn Khaldun and describes how its relevance to Indonesian nationalism. The type of this research is library research and the method used in this research is descriptive qualitative. The results of this research are, first; 'Ashabiyah is defined by Ibn Khaldun as social solidarity. According to Ibn Khaldun social solidarity or a sense of class connected by blood relation or other linkage that has the same meaning and purpose. This is because blood ties have a binding force in most humans, which makes them feel the pain that affects them. Ashabiyya is a feeling of one group or social solidarity, which arises naturally in human life due to a blood relation or revelation affinity. Such feelings of love give rise to a sense of destiny, mutuality, mutual loyalty, mutual need, especially when faced with calamities or threats of the enemy, or to achieve certain goals. Then Ibn Khaldun argues that it is impossible to create a state without the support of a strong sense of unity and solidarity. The process of its founding requires a real struggle, a battle of life and death. Solidarity ('asabiya) is principally co-operation and please help the group closely in such a way that the members of each group are not only assisting but willing to sacrifice life for the common good. And this according to him is a natural phenomenon for humans in the process of the establishment of the state. Second; The relevance or relationship between 'Ashabiyah Ibn Khaldun/ social solidarity with Indonesian nationalism in modern times is, lies in its components. Which in the 'Ashabiyah, Ibn Khaldun positioned the society or nation as a starting point to build a state, which then in truth the community both have a high spirit to fight for the ideals of the nation and state. Because the goal of Indonesian nationalism itself is nothing but to arouse the sense of brotherhood / kinship in the Indonesian nation, and always keep the national identity as a form of the love of the nation and the country.

Keywords: 'Ashabiyah, Nationalism, Ibn Khaldun

Abstrak: Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana 'Ashabiyah Ibnu Khaldun dan bagaimana 'Ashabiyah Ibnu Khaldun dan relevansinya dengan nasionalisme di Indonesia. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mendiskripsikan konsep 'Ashabiyah Ibnu Khaldun dan menguraikan bagaimana relevansinya dengan nasionalisme Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah, pertama; 'Ashabiyah diartikan oleh Ibnu Khaldun sebagai solidaritas sosial. Menurut Ibnu Khaldun solidaritas sosial atau rasa golongan yang dihubungkan oleh pertalian darah atau pertalian lain yang mempunyai arti dan tujuan yang sama. Hal ini disebabkan karena pertalian darah mempunyai kekuatan mengikat pada kebanyakan manusia, yang membuat mereka ikut merasakan tiap kesakitan yang menyimpannya. Ashabiyah merupakan perasaan satu kelompok atau solidaritas sosial, yang timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena adanya pertalian darah atau pertalian perkauman. Perasaan cinta kasih tersebut menimbulkan perasaan senasib, sepenanggungan, rasa saling setia, rasa saling membutuhkan, terlebih pada saat menghadapi musibah atau ancaman musuh, atau untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian Ibnu Khaldun berpendapat, orang tidak mungkin menciptakan negara tanpa dukungan rasa persatuan dan solidaritas yang kuat. Proses pendiriannya memerlukan perjuangan sungguh-sungguh, suatu pertarungan hidup dan mati. Solidaritas ('Ashabiyah) pada pokoknya adalah kerjasama dan tolong menolong yang erat dalam suatu kelompok yang berbentuk sedemikian rupa

sehingga anggota kelompok itu masing-masing bukan saja bantu membantu, tetapi bersedia mengorbankan jiwa untuk kepentingan bersama. Dan ini menurutnya adalah suatu gejala alami bagi manusia dalam proses berdirinya negara. Kedua; Relevansi atau hubungan antara 'Ashabiyah Ibnu Khaldun/solidaritas sosial dengan nasionalisme Indonesia pada masa modern saat ini, adalah terletak pada komponen-komponennya. Yang mana di dalam 'Ashabiyah, Ibnu Khaldun memposisikan masyarakat atau bangsa sebagai titik awal untuk membangun sebuah negara, yang kemudian sejatinya masyarakat tersebut sama-sama memiliki semangat yang tinggi untuk memperjuangkan cita-cita bangsa dan negara. Sebab tujuan dari nasionalisme Indonesia itu sendiri tidak lain ialah untuk membangkitkan rasa persaudaraan/kekeluargaan dalam diri bangsa Indonesia, dan selalu menjaga identitas nasional sebagai bentuk dari rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Kata kunci: 'Ashabiyah, Nasionalisme, Ibnu Khaldun

Pendahuluan

Secara umum istilah nasionalisme mengacu pada seperangkat gagasan dan sentimen yang membentuk kerangka konseptual tentang identitas nasional yang sering hadir bersama dengan berbagai identitas lain, seperti agama, suku, bahasa, teritorial, dan kelas. Oleh karena itu, nasionalisme atau kebangsaan adalah paham yang meyakini kebenaran pikiran bahwa setiap bangsa seharusnya bersatu padu dalam komunitas politik yang dikelola secara rasional dalam kehidupan bernegara. Dari pemahan nasionalisme seperti ini, lahirlah ide dan upaya perjuangan untuk mewujudkan negara-bangsa (nation-state). Secara empirik, hal-hal inilah yang merupakan faktor atau unsur-unsur pokok yang objektif dan teramat kuat membentuk nasionalisme serta membantu mempercepat proses evolusi nasionalisme ke arah pembentukan negara nasional.¹

Untuk mengarah bagaimana nasionalisme di dalam konteks ke Indonesiaan, sebelumnya perlu kita ketahui bagaimana proses terwujudnya konsep nasionalisme. Diketahui bahwa secara umum nasionalisme berarti suatu paham, yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Perasaan sangat mendalam terhadap suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di wilayahnya selalu ada disepanjang sejarah dengan kekuatan yang berbeda-beda. Akan tetapi baru pada akhir abad ke-18 M nasionalisme dalam arti kata modern menjadi

suatu perasaan yang diakui secara umum.²

Nasionalisme Indonesia melahirkan Pancasila sebagai ideologi negara. Perjuangan yang lama untuk mencapai kemerdekaan kini telah terwujud. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah sebagai negara yang berdaulat, merdeka, dan mandiri. Untuk memperkuat itu semua, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus, yang menjadi simbol besar yang revolusioner yang mengandung persamaan dan persaudaraan, suatu tanda hari cerah setelah digulingkannya kekuasaan asing.³

Sebuah negara-bangsa (nation-state) akan berdiri kokoh jika memiliki landasan yang kuat, yaitu ideologi yang merupakan pemersatu, perekat, dan pengikat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Para pendiri Republik Indonesia telah berhasil meletakkan dasar negara yang kuat dan kokoh, yaitu Pancasila.

Pancasila dipersiapkan oleh Badan penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mempunyai enam puluh orang anggota. Akan tetapi, hanya sembilan orang dari mereka yang dijadikan Panitia Kecil untuk merumuskan Pancasila sebagai perwujudan dari tujuan dan maksud didirikannya Indonesia merdeka. Kesembilan orang tersebut adalah; Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Ahmad Soebardjo, AA. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abdul Wahid Hasyim, Agus Salim, dan Abikusno Tjokro Sujoso.⁴

Dalam Panitia Sembilan tersebut, paling

² Hans Kohn, *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*, terj. Sumantri Mertodipuro, (Jakarta: Erlangga, 1984), h. 11

³ Taufik Abdullah, *Nasionalisme dan Sejarah*, (Bandung: Stya Historika, 2001), h. 66

⁴ Supartono Widoyosiswoyo, *Sejarah*, (Klaten, Intan, 1979), h. 187

¹ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai Konstruksi Sosial Berbasis Agama*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), h. 32

tidak ada tiga kiai yang mempunyai andil besar dalam menyusun Pancasila. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terdapat delapan kosa-kata dari khazanah Islam yang masuk dalam Pancasila, yaitu: adil, beradab, kerakyatan, hikmat, permusyawaratan, perwakilan; dan terulangnya kosa-kata "adil dan rakyat" dalam sila kelima dari Pancasila.

Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali menyambut dengan gembira Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebagaimana diketahui, BPUPKI telah menyiapkan dasar negara, yaitu Pancasila. Menurut rumusan awal, sila pertama berbunyi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Rumusan itu ditolak oleh golongan minoritas non-muslim, dan akhirnya wakil-wakil kelompok Islam menyetujui usul penghapusan anak kalimat tersebut dari Pancasila dan batang tubuh pembukaan UUD 1945. Akan tetapi, sila pertama tersebut mendapat tambahan kata kunci sehingga menjadi: "Ketuhanan Yang Maha Esa".⁵

Dengan demikian, moral pancasila yang pertama adalah keyakinan dan kerukunan sebagai wujud nyata dari ketaqwaan dan keimanan terhadap eksistensi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meyakini adanya zat yang Maha Kuasa yang meyakini kebenaran dan dibawakan serta diajarkan oleh para Nabi dan Rasul-Nya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diyakini kebenarannya adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dirumuskan para pendiri negeri ini, yaitu pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multi agama. Kerukunan antar umat beragama, inter umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah adalah kunci keberhasilan untuk mencapai masyarakat adil, makmur, aman, dan sejahtera.⁶

Sebagaimana pula dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah tercantum pada bab XI tentang agama dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut

agamanya dan kepercayaannya itu".⁷

Terlepas dari penjelasan mengenai hal di atas, terdapat semacam relevansi antara nasionalisme Indonesia dengan 'ashabiyah Ibnu Khaldun. 'Ashabiyah adalah perasaan satu kelompok atau solidaritas sosial, yang timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena adanya pertalian darah atau pertalian perkauman. Perasaan cinta kasih tersebut menimbulkan perasaan senasib, sepenanggungan, rasa saling setia, rasa saling membutuhkan, terlebih pada saat menghadapi musibah atau ancaman musuh, atau untuk mencapai tujuan tertentu.⁸

'Ashabiyah disini diartikan oleh Ibnu Khaldun sebagai solidaritas sosial. Menurut Ibnu Khaldun solidaritas sosial atau rasa golongan yang dihubungkan oleh pertalian darah atau pertalian lain yang mempunyai arti dan tujuan yang sama. Hal ini disebabkan karena pertalian darah mempunyai kekuatan mengikat pada kebanyakan manusia, yang membuat mereka ikut mearsakan tiap kesakitan yang menimpakannya.⁹

Kemudian Ibnu Khaldun berpendapat, orang tidak mungkin menciptakan negara tanpa dukungan rasa persatuan dan solidaritas yang kuat. Proses pendiriannya memerlukan perjuangan sungguh-sungguh, suatu pertarungan hidup dan mati. Solidaritas ('ashabiyah) pada pokoknya adalah kerjasama dan tolong menolong yang erat dalam suatu kelompok yang berbentuk sedemikian rupa sehingga anggota kelompok itu masing-masing bukan saja bantu membantu, tetapi bersedia mengorbankan jiwa untuk kepentingan bersama. Dan ini menurutnya adalah suatu gejala alami bagi manusia dalam proses berdirinya negara.¹⁰

Dalam kehidupan bernegara, terdapat dua kekuatan dominan. Kekuatan pertama adalah kekuatan kekuatan primitif dan utama yang oleh Ibnu Khaldun disebut dengan 'ashabiyah, atau elemen-elemen pengikat dalam masyarakat. Solidaritas sosial atau perasaan kelompok yang mampu menyatukan masyarakat, dalam sebuah negara dan sebuah kerajaan, atau dalam

⁵ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai...* h. 120

⁶ Maswardi Muhammad Amin, *Pendidikan Karakter Anak Bangsa*, (Jakarta: Baduose Media, 2011), h. 97

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), h. 161

⁸ Abdurahman Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Ahmadi Toha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 151

⁹ Abdurahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah...*, h. 128

¹⁰ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik; Perbandingan Antara Islam Dan Barat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), h. 101

kelompok yang lebih luas dapat disamakan dengan patriotisme. Akan tetapi, patriotisme dan 'ashabiyah bukanlah merupakan sinonim. Patriotisme tidak lain adalah bentuk lain dari 'ashabiyah sebagaimana yang dideskripsikan oleh Ibnu Khaldun.¹¹

Dalam hal ini, 'ashabiyah muncul dan berkembang ketika perasaan untuk melindungi diri membangkitkan sense of kindship (rasa kekeluargaan) yang kuat dan mendorong manusia untuk menciptakan hubungan antara yang satu dengan yang lain. Hal ini adalah kekuatan yang paling vital bagi suatu negara dimana dengannya, mereka akan tumbuh dan berkembang dan jika ia melemah, maka mereka akan mengalami kemunduran yang signifikan.¹²

Sementara agama merupakan kekuatan yang kedua. Ibnu Khaldun mengedepankan suatu solidaritas yang tanpanya negara tidak bisa eksis. Agama merupakan pendukung 'ashabiyah dan pada dasarnya juga memperkuat 'ashabiyah.

Dalam hal ini Ibnu Khaldun menjelaskan:

Agama dapat memunculkan solidaritas kelompok karena ia dapat menyingkirkan perasaan iri dan dengki dari anggota-anggota kelompok antara satu dengan yang lainnya dan mampu pula mengarahkan mereka kepada kebenaran. Ketika mata-mata mereka telah melihat kebenaran, maka mereka semua akan memiliki pandangan dan tujuan yang sama, dan mereka akan berjuang bahkan meski demi mencapai tujuannya, sedangkan mereka yang tidak memiliki tujuan-tujuan yang baik dan keyakinan yang mendalam akan mengalami kekalahan dan peperangan melawan mereka yang memiliki keyakinan tinggi. Pada kenyataannya hal itulah yang terjadi, sejak terjadi pada awal-awal penaklukan wilayah-wilayah oleh Islam. Meskipun pemeluk (Islam) semakin bertambah banyak dari waktu ke waktu akan tetapi solidaritas kelompok serta keyakinan tinggi yang mereka miliki lebih mampu meraih kemenangan-kemenangan yang penting bagi mereka.¹³

¹¹ Eugene. A. Myers, *Zaman Keemasan Islam: Para Ilmuwan Muslim dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Barat*, terj. Maufur al-Khoiri, (Yogyakarta : Fajar Pustaka Utama, 2003), h. 72

¹² Wendy Melfa dan Solihin Siddiq, *Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam; Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Lampung: Matakata, 2007), h. 90

¹³ Abdurahman Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*...., h. 198

Dengan demikian, gagasan Ibnu Khaldun dalam pendirian negara, di samping mendasarkan teorinya pada proses sosiologis, juga didasarkan pada agama. Ia tetap sebagai pelanjut pemikir-pemikir sebelumnya, seperti Farabi, Mawardi, Ghazali, dan Ibnu Taimiyah. Akan tetapi kelebihan Ibnu Khaldun tampak pada peranan solidaritas yang begitu besar dalam pembentukan negara, keemasan, dan keruntuhannya.¹⁴

Untuk itu, menurut peneliti pentingnya kajian ini diteliti bahwa 'ashabiyah (solidaitas sosial) dalam pandangan Ibnu Khaldun terdapat suatu unsur rasa kekeluargaan atau perasaan senasib dalam kehidupan masyarakat. Begitu pun juga di dalam nasionalisme Indonesia yang memiliki unsur kebersamaan atau perasaan senasib sepenanggungan. Yang mana pada awal sebelum kemerdekaan telah mengalami berbagai perjuangan dan rintangan yang amat tidak mudah dalam melawan penjajah yaitu kolonialisme Belanda.

Disinilah letak relevansi antara 'ashabiyah Ibnu Khaldun/solidaritas sosial dengan nasionalisme Indonesia, yang sejatinya sama-sama memiliki semangat yang tinggi untuk memperjuangkan cita-cita bangsa dan negara. Sebab tujuan dari nasionalisme Indonesia itu sendiri tidak lain dan tidak bukan ialah untuk membangkitkan rasa persaudaraan/kekeluargaan dalam diri bangsa Indonesia, dan selalu menjaga identitas nasional sebagai bentuk dari rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara.

Rumusan Masalah

Masalah yang akan diteliti dalam jurnal tesis ini difokuskan pada dua hal, yaitu:

1. Bagaimana 'ashabiyah menurut Ibnu Khaldun?
2. Bagaimana relevansi 'ashabiyah Ibnu Khaldun dengan nasionalisme di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan bagaimana 'ashabiyah menurut Ibnu Khaldun.
2. Menjelaskan bagaimana relevansi 'ashabiyah Ibnu Khaldun dengan nasionalisme di Indonesia.

¹⁴ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik*..., h. 102

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk meneliti suatu objek, baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran filsafat, nilai-nilai etika, nilai karya seni, sekelompok manusia, peristiwa atau objek budaya lainnya.¹⁵ Sedangkan Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) yaitu penelitian yang mengkaji objek material karya-karya, sumber datanya dikumpulkan dari buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan objek material penelitian tersebut.¹⁶ Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang itu sendiri.¹⁷

Istilah penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Kirk dan Miller

memberi definisi bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial, yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. Sedangkan Bogdan dan Taylor, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸

2. Langkah-Langkah Dalam Penelitian Kepustakaan

▪ Menyiapkan alat perlengkapan

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan dalam penelitian nantinya, seperti pensil, pena, dan alat untuk mencatat hal-hal yang menjadi bahan utama penelitian, atau pun untuk mencatat sumber buku sebagai referensi.

▪ Menyusun bibliografi kerja

Setelah alat perlengkapan penelitian lengkap, tugas pertama dalam riset kepustakaan adalah mulai dengan menyusun bibliografi kerja yaitu catatan mengenai bahan sumber utama yang akan digunakan untuk kepentingan penelitian.

▪ Mengatur waktu

Hal berikutnya yang harus diperhatikan adalah waktu, pengaturan waktu harus dilakukan untuk menghindari banyak terbuangnya waktu sia-sia. Waktu penelitian harus diatur kapan mulai penelitian dan kapan harus selesainya.

▪ Membaca dan membuat catatan penelitian

Pada tahap terakhir ini, peneliti harus membaca bahan-bahan dan membuat catatan penelitian guna kelengkapan bahan yang diperlukan dalam penelitian, karena memang penelitian kepustakaan data yang diperoleh hanya melalui buku, maka dalam melakukan penelitian, peneliti harus membaca dan mencatat bahan utama dalam penelitian.

19

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer adalah sumber data inti atau pokok yaitu;

- Muqaddimah Ibnu Khaldun
- Al-'Ibar Wadiwanul Muftada Wal Khobar Ayyamil Arabi Wal Jamaah Wal Baroro Wamin 'Ashorohum Min Zawwil Sulthoni Akbar (Tarikh Ibnu Khaldun).
- Al-'Ibar wa Dhuan al-Muftada' wa al-khabar fi Ayyam al-'Arab wa al-'Ajam wa al-Barbar wa man 'Asharhiim min Dzawi al-Sulthan al-Akhbar.
- Al-Ta'rif Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Garban wa Syarqan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pelengkap yang diperoleh dari buku-buku karangan para penulis lainnya atau buku-buku yang lain yang berkaitan dengan kajian tokoh, judul atau rumusan masalah penelitian. Diantaranya:

- Oesman Raliby, Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat Dan Negara

¹⁵ Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta : Paradigma, 2005), h. 58

¹⁶ Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif..., h. 138

¹⁷ Arief Furchan, Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1992), h. 22

¹⁸ Sudarto, Metode Penelitian Filsafat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 62

¹⁹ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 17

- Fuad Baali dan Ali Wardi, *Ibnu Khaldun Dan Pola Pemikiran Islam*
- Ali Abdulwahid Wafi, *Ibnu Khaldun Riwayat Dan Karyanya*
- Ali Audah, *Ibnu Khaldun Sebuah Pengantar*
- Wendy Melfa dan Solihin Siddiq, *Paradigma Pengembangan Masyarakat Islam; Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*
- Ahmad Syafii Maarif, *Ibnu Khaldun Dalam Pandangan Penulis Barat Dan Timur*
- Syafiuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun dan*
- Moh. Pribadi, *Pemikiran Sosiologi Islam Ibnu Khaldun.*

c. Data Penunjang

Data-data penunjang yaitu data-data yang berasal dari berbagai sumber media cetak, internet, jurnal ilmiah atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Pengumpulan data dapat berupa buku, artikel, majalah, jurnal dan lain sebagainya. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisa dokumen, baik tertulis, gambar maupun elektronik.²⁰

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti tiga tahap analisis data, yaitu proses mereduksi (dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari substansi serta pola-polanya), klasifikasi data (mengkelompokkan data-data berdasarkan ciri khas masing-masing berdasarkan objek formal penelitian), dan mendisplay data (mengorganisasikan data-data dalam suatu peta yang sesuai dengan objek formal dan tujuan penelitian)²¹ yang sudah terkumpul. Setelah pengumpulan data, maka dilakukan pengolahan

data untuk memilih hal-hal yang berkaitan dengan kajian penelitian. Setelah mereduksi data selanjutnya mengkaji data dalam bentuk sistematis agar terfokus dan mudah dipahami.

Landasan Teori

Dalam sebuah penelitian untuk menyelesaikan permasalahan dibutuhkan sebuah teori dalam mengupasnya sehingga penelitian tersebut akan mendapatkan hasil yang terarah. Untuk itu kaitannya dalam membedah konsep Ibn Khaldun tentang teori 'ashabiyah dan relevansinya dengan nasionalisme, maka penulis mengawali dengan memaparkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan nasionalisme.

Nasionalisme yang pada mulanya mementingkan hak asasi manusia pada tahap selanjutnya beranggapan kekuasaan bersama-sama yang terwujud dalam negara lebih penting daripada kemerdekaan individual. Pandangan yang menjadikan negara sebagai pusat merupakan pandangan beberapa beberapa pemikir Eropa saat itu, diantaranya Hegel. Berpendapat bahwa kepentingan negara harus diutamakan dalam hubungan negara dan masyarakat, karena ia merupakan kepentingan rasional sementara kepentingan setiap individu adalah kepentingan personal. Negara adalah ideal yang diobyektifikasi, dan karenanya, individu hanya dapat menjadi sesuatu yang obyektif melalui keanggotaannya dalam negara. Dan dia menyatakan bahwa negara mengendalikan monopoli untuk menentukan apa yang benar dan salah mengenai hakikat negara, menentukan apa yang moral dan yang bukan moral, serta segala yang baik dan apa yang destruktif.²²

Hal ini melahirkan kecenderungan nasionalisme yang terlalu mementingkan tanah air (patriotisme yang mengarah pada chauvinisme), yang mendorong masyarakat Eropa melakukan ekspansi-ekspansi ke wilayah dunia lain. Absolutisme negara dihadapan rakyat memiliki kemungkinan akan adanya pemimpin totaliter, yang merupakan suatu bentuk ideal negara dalam paham Hegel, sebuah monarki.²³ Totaliter ianisme yang dianjurkan oleh filsafat negara Hegel dapat

²⁰ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 92

²¹ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 69

²² Marsillam Simandjuntak, *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), h. 166

²³ Marsillam Simandjuntak, *Pandangan Negara...*, h. 224

menggiring sebuah pemerintahan menjadi pemerintahan yang fasis. Fasisme adalah doktrin yang mengajarkan kepatuhan mutlak terhadap perintah dalam semua aspek kehidupan nasional. Dalam sejarahnya, fasisme berhubungan erat dengan rasisme yang mengutamakan sebagian ras (suku) atas sebagian yang lain.

Menurut Hugh Purcell, nasionalisme dan rasisme merupakan gambaran paling terkenal dari fasisme pada tahun 1930-an. Rasisme memiliki kaitan erat dengan nasionalisme. Keduanya berbeda pada penekanan. Rasisme menekankan superioritas suku dan nasionalisme menekankan keunggulan bangsa (komunitas terbayang yang lebih besar dari suku). Manusia nasionalis adalah seseorang yang memiliki kebanggaan terhadap bangsanya terkadang diungkapkan dengan cara berlebihan. Nasionalisme dan rasisme memiliki keserupaan dalam hal pengunggulan dan kebanggaan terhadap sesuatu yang secara alamiah melekat pada setiap manusia. Yang pertama kebanggaan terhadap bangsa, sistem pemerintahan, suku, dan budaya. Yang kedua kebanggaan terhadap suku.²⁴

Menurut Sartono Kartodirdjo, ada lima prinsip dalam nasionalisme, dimana yang satu dengan yang lainnya saling terkait untuk membentuk wawasan nasional. Kelima prinsip tersebut adalah (1) kesatuan (unity), yang dinyatakan sebagai *conditio sine qua non*, syarat yang tidak bisa ditolak; (2) kemerdekaan (liberty), termasuk kemerdekaan untuk mengemukakan pendapat; (3) persamaan (equality) bagi setiap warga untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing, dan (5) kepribadian (personality) yang terbentuk oleh pengalaman budaya dan sejarah bangsa, serta performance dalam arti kualitas atau prestasi yang dibanggakan kepada bangsa lain.²⁵

Dalam kaitan ini, secara umum istilah nasionalisme mengacu pada seperangkat gagasan dan sentimen yang membentuk kerangka konseptual tentang identitas nasional yang sering hadir bersama dengan berbagai identitas lain, seperti agama, suku, bahasa, teritorial, dan kelas. Oleh karena itu, nasionalisme atau kebangsaan

adalah paham yang meyakini kebenaran pikiran bahwa setiap bangsa seharusnya bersatu padu dalam komunitas politik yang dikelola secara rasional dalam kehidupan bernegara. Dari pemahaman nasionalisme seperti ini, lahirlah ide dan upaya perjuangan untuk mewujudkan negara-bangsa (*nation-state*). Secara empirik, hal-hal inilah yang merupakan faktor atau unsur-unsur pokok yang objektif dan teramat kuat membentuk nasionalisme serta membantu mempercepat proses evolusi nasionalisme ke arah pembentukan negara nasional.²⁶

Orientasi ke negara nasional dari konsep nasionalisme ini menampilkan diri, pertamanya dan terutama, sebagai suatu gerakan kemerdekaan dari dominasi kolonia dan baru kemudian sebagai gerakan demokrasi. Oleh karena itu, nasionalisme bukanlah sesuatu yang jatuh dari langit, ada akar historisnya. Hanya saja, akar historis tersebut tidak jarang bermula dari sejarah kolonialisme.²⁷

Kemudian terkait dengan nasionalisme, terdapat beberapa kiai yang menyamakan antara nasionalisme atau rasa kebangsaan dengan *asy-syu'ubiyah* yaitu KH. Hasymi Arkhas, KH. Yasri Marzuki, dan KH. Zuhdi Zaini mendefinisikan nasionalisme sama dengan inti dari kosa kata *asy-syu'ubiyah* sebagaimana tersurat dalam QS. Al-Hujurat (49): 13. Bagi mereka, nasionalisme atau *asy-syu'ubiyah* sebenarnya dapat diartikan dengan rasa kebangsaan dari setiap warga negara terhadap negaranya.²⁸

Selanjutnya KH. Hasymi Arkhas menambahkan bahwa nasionalisme sebagai wilayah spiritual dan komitmen moral yang oleh NU sumber inspirasinya berasal dari (1) ikut merasa suka dan duka atas nasib yang menimpa umat sebangsa dan setanah air, (2) siap meleburkan diri dengan kelompok lain demi kepentingan nasional, yang pada zaman dahulu telah dibuktikan oleh para kiai dalam lasykar Hisbullah dan Sabilillah, (3) semangat bersatu demi keutuhan bangsa dan kedaulatan negara, dan (4) menjunjung prinsip budaya "membedakan hak pribadi berupa keyakinan agama dengan hak negara".²⁹

²⁴ Hugh Purcell, *Fasisme*, terj. Reza dkk, (Jogjakarta: Insist Press, 2000), h. 11

²⁵ Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional Kebudayaan Indonesia*, (Yogyakarta: UGM, 1992), h.

²⁶ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai...*, h. 32

²⁷ Ariel Hariant, *Nasionalisme Refleksi Kritis Kaum Ilmuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 3

²⁸ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai...*, h. 236

²⁹ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai...*, h. 237

Sebagaimana pula dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah tercantum pada bab XI tentang agama dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.³⁰

Pembahasan

A. *Ashabiyah* Menurut Ibnu Khaldun

Untuk memberikan penjelasan tentang negara dan perkembangannya dalam pemikiran Ibnu Khaldun, tidak dapat dilepaskan dari adanya ‘ashabiyah. ‘Ashabiyah adalah konsep terpenting dari Ibnu Khaldun.

1. Pengertian dan Asal Usul *Ashabiyah*

Istilah ‘ashabiyah berasal dari bahasa arab yaitu *يَصْع - هِصْع* yang artinya semangat golongan, atau partai.³¹ Adapun secara harfiah ‘ashabiyah berarti rasa satu kelompok. Kemudian menurut Charles Issawi dalam buku Wendy Melfa, menyatakan ‘ashabiyah adalah faktor penggerak kekuasaan dan para pendukungnya untuk maju terus ke depan.³²

‘Ashabiyah sebagaimana diutarakan Ibnu Khaldun adalah rasa cinta/fanatisme seseorang terhadap keturunan, keluarga, dan golongannya. Perasaan kasih dan cinta timbul secara alami sebagai sifat dasar manusia yang merupakan pemberian Allah. Dengan sifat tersebut muncul sikap saling menolong dan membantu.³³

Dalam ungkapan lain, ‘ashabiyah merupakan jerit tangis seseorang terhadap penderitaan kerabatnya, walau bagaimana pun bentuk hubungan kekerabatan tersebut. Hal ini dikarenakan pertalian darah yang secara psikologis mengikat pada kebanyakan umat manusia, dan merupakan tabiat untuk menjalin hubungan emosional dengan orang yang disayangi dan dihormati.³⁴

Kemudian asal usul ‘ashabiyah itu adalah pemuliaan ikatan darah yaitu sesuatu yang tabi’i pada watak manusia, dengan sedikit pengecualiannya. Ikatan itu menimbulkan cinta pada kaum kerabat, dan keluarga seseorang.³⁵

Lebih jelasnya Ibnu Khaldun mengatakan bahwa asal usul ‘ashabiyah berawal dari pemuliaan ikatan darah adalah sesuatu yang tabi’i pada watak manusia. Ikatan itu menimbulkan cinta pada kaum kerabat dan keluarga seseorang, dengan membangkitkan perasaan supaya hendaknya janganlah ada cedera atau bencana yang datang menimpa mereka itu. orang akan merasa malu jika kaum kerabatnya diperlakukan tidak baik ataupun diserang, dan orang itu akan turut turun tangan untuk meleraikan mereka dengan bahaya atau kehancuran apapun yang mengancam mereka itu. inilah satu dorongan tabi’i pada manusia sejak makhluk manusia itu muncul di dunia.³⁶

Setelah mengkaji tentang pendorong terbentuknya ‘ashabiyah, dapat dimengerti bahwa ‘ashabiyah tidak hanya berdasarkan ikatan kekeluargaan atau rasialisme, akan tetapi Ibnu Khaldun memperluas ruang lingkup ‘ashabiyah pada solidaritas sosial yang terdapat di kalangan orang-orang desa dan juga di kalangan orang-orang kota. Berkaitan dengan hal tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa ‘ashabiyah dapat berarti partai, patriotisme, dan nasionalisme.³⁷ Nampaknya deliar Noer melihat perkembangan kehidupan negara zaman modern ini, agaknya ikatan nasionalisme itu akan disebut juga oleh Ibnu Khaldun sebagai ikatan ‘ashabiyah.

2. *Ashabiyah* Sebagai Dasar Pembentukan Negara dan Pemerintahan

Konsep ‘ashabiyah mempunyai perang penting dalam mencegah konflik dan ketidakadilan dan untuk menjaga kebersamaan masyarakat, hal ini karena kapasitas individu yang tidak memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasarnya atau bahkan mempertahankan diri.

Umat manusia secara alamiah adalah kelompok sosial dan cenderung untuk hidup

³⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), h. 161

³¹ A.W. Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progresif, 197), h. 936

³² Wendy Melfa dan Solihin Siddiq, Paradigma Pengembangan Masyarakat..., h. 88

³³ Abdurrahman Ibnu Khaldun, Muqaddimah..., h. 28

³⁴ Syafiuddin, Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun, (Yogyakarta: Gama Media, 2007), h. 90

³⁵ Wendy Melfa dan Solihin S, Paradigma Pengembangan..., h. 89

³⁶ Osman Raliby, Ibnu Khaldun Tentang Masyarakat Dan Negara, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 156

³⁷ Deliar Noer, Pemikiran Politik di Negeri Barat, (Jakarta: Rajawali, 1983), h. 56

bersama. Manusia sangat memerlukan bantuan dan kerjasama dengan yang lain, tetapi manusia tidak dapat hidup bersama dan bekerjasama dalam suasana konflik, permusuhan dan ketidakadilan. Hal-hal tersebut akan membuat kehidupan sosial tidak mungkin dapat diwujudkan. Untuk itulah diperlukan 'ashabiyah dan kekuatan pengendalian atau pemerintah.³⁸

'Ashabiyah adalah rasa solidaritas sosial yang di dalamnya terdapat suku-suku atau kelompok yang bekerjasama untuk kepentingan bersama. Akan tetapi rasa solidaritas sosial tersebut akan hancur bilamana suatu suku atau kelompok tersebut terpecah belah atau tidak mau lagi bekerjasama. Karena alasan inilah, persekutuan suatu kelompok atau suku memerlukan hadirnya seorang penguasa atau raja yang mampu menangkal agresi. Kebutuhan akan adanya seseorang yang mempunyai otoritas dan bisa mengendalikan ini kemudian meningkat. Didukung dengan rasa kebersamaan yang terbentuk bahwa seorang pemimpin dalam mengatur dan menjadi penengah tidak dapat bekerja sendiri sehingga membutuhkan kemampuan tentara yang kuat dan loyal sebagai pertahanan bangsa, perdana menteri, serta pembantu-pembantu yang lain hingga terbentuklah sebuah dinasti (daulah) atau kerajaan.³⁹

Adanya 'ashabiyah (solidaritas sosial) yang kuat merupakan suatu keharusan bagi banggunya suatu negara atau dinasti besar. Oleh karenanya jarang terjadi suatu negara dapat berdiri di suatu kawasan di mana terdapat beraneka ragam suku. Sebab dalam keadaan yang demikian masing-masing suku mempunyai kepentingan dan aspirasi yang berbeda-beda satu sama lain, dan tiap kepentingan dan aspirasi suku-suku tersebut didukung oleh 'ashabiyah suku, atau dengan kata lain dinasti yang besar dan kuat hanya dapat berdiri apabila terdapat homogenitas, sehingga menimbulkan solidaritas sosial yang kuat.⁴⁰

Untuk menampung kepentingan dan aspirasi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku diperlukan sebuah wadah yang bernama negara. Namun demikian negara tidak akan

bertahan lama atau akan mengalami kehancuran jika masyarakatnya tidak mau lagi bekerjasama dan berpecah belah. Oleh karena itu diperlukan seorang pemimpin atau kepala negara yang mampu menangkal agresi, mengendalikan dan mengatur negara.

3. Peran 'Ashabiyah Dalam Sosial-Politik

Menurut Ibnu Khaldun, dalam uraiannya tentang peran sosial 'ashabiyah, ia mengatakan bahwa 'ashabiyah merupakan suatu jalinan sosial yang membuat bangsa bersatu padu, terlepas 'ashabiyah itu timbul karena ikatan kekeluargaan atau persekutuan. Kemudian 'ashabiyah mempunyai dua peran sosial yaitu pertama, menumbuhkan solidaritas sosial dan kekuatan dalam jiwa kelompoknya. Kedua, mempersatukan berbagai 'ashabiyah yang bertentangan sehingga menjadi suatu kelompok manusia yang besar dan bersatu.⁴¹

Kemudian 'Ashabiyah merupakan kekuatan politik yang mendorong pembentukan negara atau dinasti. 'Ashabiyah mensyaratkan adanya pemimpin, yakni seorang tokoh yang mendapat dukungan dari keluarganya dan pengikutnya. Dalam konsep 'ashabiyah tidak semua orang bisa menjadi pemimpin, sebab pimpinan diperoleh dengan kemenangan, oleh karena itu 'ashabiyah pimpinan harus lebih kuat daripada 'ashabiyah-'ashabiyah lain agar kemenangan tersebut dapat terwujud.⁴²

Menurut Ibn Khaldun kepemimpinan bukan merupakan kekuasaan "de jure" tetapi merupakan kekuasaan "de facto" dan kepemimpinan diperoleh dengan kemenangan, yakni dengan penggunaan kekuatan. Dengan demikian kepemimpinan terpusatkan pada salah satu cabang 'ashabiyah yang paling kuat. 'Ashabiyah sendiri merupakan suatu bentuk khusus organisasi politik dengan puncaknya suatu aritokrasi kesukuan yang memerintah dalam suasana demokrasi yang bebas. Jadi apabila di antara anggota-anggota suku terjadi persamaan, maka tidaklah demikian dalam hubungan mereka dengan para pemegang kepemimpinan. Masyarakat desa merupakan syarat primer adanya 'ashabiyah, dibalik itu ada sebagian suku-suku tidak memiliki 'ashabiyah,

³⁸ Ibn Khaldun, Muqaddimah..., h. 166

³⁹ Ibn Khaldun, Muqaddimah..., h. 139

⁴⁰ Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, sejarah dan Pemikiran (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990), h. 105

⁴¹ Zainab al-Khudhairi, Filsafat Sejarah..., 159

⁴² Ibn Khaldun, Muqaddimah..., h. 114

yaitu suku-suku yang tunduk kepada suku lain. Atau suku tersebut tidak dapat mempertahankan dirinya sendiri, dan harus membayar pajak, maka pimpinannya tidak dapat memerintah sesuai dengan kehendaknya sendiri.⁴³

Adapun tujuan yang hendak dicapai 'ashabiyah adalah kekuasaan. Menurut Ibn Khaldun mengenai hal ini: "Bahwa kemenangan terdapat di pihak yang mempunyai solidaritas yang lebih kuat, dan anggota-anggotanya lebih sanggup berjuang dan bersedia mati guna kepentingan bersama." Kedudukan sebagai raja adalah suatu kedudukan yang terhormat dan diperebutkan, karena kedudukan memberikan kepada pemeganya segala kekayaan duniawi dan juga kepuasan lahir batin. Karena itulah kekuasaan menjadi sasaran perebutan dan jarang sekali dilepaskan dengan suka rela kecuali dibawah paksaan. Perebutan menimbulkan perjuangan dan peperangan dan runtuhnya singgasana-singgasana. Semuanya itu tidaklah dapat terjadi kecuali dengan 'ashabiyah atau solidaritas sosial.⁴⁴

Tetapi bila kekuasaan telah berdiri teguh dan mereka yang dikuasai telah pula terbiasa dengan kekuasaan yang ada, maka menurut Ibn Khaldun, alat-alat kekuasaan kurang memegang peranan, termasuk 'ashabiyah, seperti yang terdapat pada waktu menegakkan kekuasaan semula. Dalam keadaan demikian penguasa dan orang-orang yang telah membantunya menegakkan kekuasaan itu mulai melihat kepada hal-hal lain yang dirasakan menarik, terutama pada kemewahan yang datang tanpa dicapai. Karena pada dasarnya, dan menjadi tabiatnya pula bahwa kekuasaan itu di iringi dengan kemewahan. Tetapi kemewahan ini hanya mula-mula saja akan menambah kekuatan penguasa, namun akhirnya kekuatan ini akan melemah karena kemewahan itu mengandung sifat yang merusakkan manusia, yaitu pada ahlakunya.

Ia akan melupakan seseorang tentang kewajiban-kewajibannya yang sesuai dan harus dipenuhi sebagai seorang penguasa. Ini akan melemahkan 'ashabiyah tadi, dan dalam keadaan demikian seorang penguasa akan mendasarkan kekuasaannya pada serdadu upahan atau tentara bayaran. Bila ini terjadi sekurang-kurangnya

untuk sementara perkembangan akan menuju kepada pemusatan kekuasaan dan kekerasan untuk memaksakan kehendak oleh golongan yang mula-mula menegakkan daulah. Pemusatan kekuasaan itu tidak dibenarkan, 'ashabiyah pada awalnya akan menyuruh orang untuk membagi kemenangan dan kemegahan yang diperoleh secara bersama-sama. Bila timbul juga pemusatan kekuasaan, maka rasa golongan itu akan hancur.⁴⁵ Menurut Ibn Khaldun bila mana suatu 'ashabiyah dalam keadaan kuat ia akan menaklukkan 'ashabiyah-'ashabiyah lainnya yang lebih lemah, keadaan yang demikian ini berlangsung sampai 'ashabiyah tersebut memperoleh kesempatan untuk menguasai Negara.

4. Perkembangan dan Runtuhnya Negara

Dalam tahap perkembangan suatu negara, Ibn Khaldun mengatakan bahwa masyarakat manusia akan berjalan mengikuti tahap-tahap berjenjang, seperti halnya tahapan yang dilalui manusia sejak lahir hingga ia kemudian wafat. Begitu pula dengan negara, sama dengan individu memiliki umur yang alami. Umur suatu negara biasanya hanya tiga generasi dengan hitungan satu generasi sama dengan 40 tahun, maka dengan demikian umur suatu negara menurutnya adalah 120 tahun. Umur tiga generasi tersebut dibagi menjadi lima tahapan, yang harus dilalui oleh masyarakat tersebut.

a) Tahap Pendirian Negara

Tahap pertama: Tahap pendirian negara. Negara tidak akan tegak kecuali dengan 'ashabiyah (solidaritas sosial). Karena dengan adanya 'ashabiyah akan membuat orang menyatukan upaya untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu mempertahankan diri, dan menolak atau mengalahkan musuh.⁴⁶

b) Tahap Pemusatan Kekuasaan

Tahap kedua: yaitu tahap pemusatan kekuasaan. Menurut Ibn Khaldun pemusatan kekuasaan merupakan kecenderungan yang alamiah pada manusia. Karena seorang penguasa melihat bahwa kekuasaannya telah mapan maka ia akan berupaya, menghancurkan 'ashabiyah (solidaritas sosial), memonopoli kekuasaan, dan

⁴³ Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun...*, h. 153

⁴⁴ Ibn Khaldun, *Muqaddimah...*, h.122

⁴⁵ Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negara Barat* (Jakarta: Mizan, 2000), h. 72

⁴⁶ Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah ...*, h. 171

menjauhkan anggota-anggota 'ashabiyah dari roda pemerintahan. Dan beralih kedudukan dari seorang pemimpin 'ashabiyah menjadi raja atau pemegang kekuasaan.⁴⁷ Dalam hal ini dialah yang menegakkan negara.

c) Tahap Kekosongan dan Kesantiaian

Tahap Ketiga: Tahap ini merupakan tahap kekosongan dan kesantiaian. Menurut Ibn Khaldun, tahap ketiga adalah tahap kekosongan dan kesantiaian untuk menikmati buah kekuasaan yang seiring watak manusia, seperti mengumpulkan kekayaan, mengabadikan peninggalan-peninggalan dan meraih kemegahan. Berbagai upaya dicurahkan untuk menarik pajak, mengelola pengeluaran dan pemasukan menghitung biaya, membangun gedung-gedung yang tinggi dan pabrik-pabrik yang besar dan bangunan-bangunan yang menjulang tinggi.⁴⁸

d) Tahap Ketundukan dan Kemalasan

Tahap Keempat: Tahap ketundukan dan kemalasan. Pada tahap ini pemegang tampuk pemerintahan menerima apa saja yang dibina para raja sebelumnya dan mengikuti apa yang dilakukan para pemegang kekuasaan sebelumnya.⁴⁹ Negara pada saat ini dalam keadaan statis, tidak ada perubahan apapun yang terjadi, dan negara seakan-akan berada diujung kisah.

Tahap Kelima: Tahap ini merupakan tahap berfoya-foya dan penghamburan kekayaan. Pada tahap ini pemegang kekuasaan dengan seenaknya menghambur-hamburkan kekayaan yang dikumpulkan oleh para pendahulunya untuk memenuhi hawa nafsu, kesenangan, menghibur diri bersama kaumnya, dan memamerkan kedermawanannya kepada orang-orang dalam. Sehingga ia menjadi penghancur apa yang telah digariskan dan dibina para pendahulunya.⁵⁰

e) Tahap Keruntuhan Kekuasaan

Negara pada tahap ini telah memasuki masa ketuaan dan dihinggapi, penyakit kronis yang hampir tidak dapat ia hindari, hingga pada

saatnya menuju keruntuhan dan hancur.⁵¹ Ketika ia berpaling dari kehidupan yang sederhana dan primitif menuju kehidupan yang berbudaya (tahap kedua), maka pada tahap inilah negara tertimpa penyakit kebudayaan yang paling berbahaya. Namun pada tahap ini negara sedang berada pada puncak kejayaan dan kekuatannya, sehingga gejala-gejala tersebut belum nampak. Gejala-gejala tersebut akan nampak apabila negara mulai mengalami kelemahan dan disintegrasi. Menurut Ibn Khaldun, ada dua faktor yang menjadi penyebab disintegrasi negara, yaitu hilangnya 'ashabiyah (solidaritas sosial) dan tidak adanya sumber keuangan yang kuat akibat tindakan pemegang kekuasaan yang suka berfoya-foya sehingga negara mengalami keruntuhan baik secara politis maupun ekonomis.⁵²

B. Nasionalisme Indonesia

1. Latar Belakang Nasionalisme di Indonesia

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk, kemajemukan ini ditandai oleh adanya suku-suku bangsa yang masing-masing mempunyai cara-cara hidup atau kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat suku bangsanya sendiri-sendiri sehingga mencerminkan adanya perbedaan dan pemisahan antara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa lainnya, tetapi secara bersama-sama hidup dalam satu wadah masyarakat Indonesia dan berada di bawah naungan sistem nasional dengan kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁵³

Munculnya paham nasionalisme atau kebangsaan Indonesia tidak bisa dilepaskan dari situasi sosial politik dekade pertama abad ke-20. Pada waktu itu semangat menentang kolonialisme Belanda mulai bermunculan di kalangan pribumi. Cita-cita bersama untuk merebut kemerdekaan menjadi semangat umum di kalangan tokoh-tokoh pergerakan nasional untuk memformulasikan bentuk nasionalisme yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Paham nasionalisme Indonesia yang disampaikan

⁴⁷ Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah* ..., h.172

⁴⁸ Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah* ..., h.174

⁴⁹ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*..., h. 154

⁵⁰ Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah*..., h. 175

⁵¹ Abd Rahman, *Muqaddimah Ibn Khaldun*..., h. 176

⁵² Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah* ..., h.175

⁵³ Parsudi Suparlan, *Interaksi Antar Etnik di Beberapa Propinsi di Indonesia*, (Jakarta: Dirjen Kebudayaan Depdikbud, 1989), h. 4

oleh Soekarno yang disuarakan adalah bukan nasionalisme yang berwatak sempit, tiruan dari Barat, atau berwatak chauvinism tetapi bersifat toleran, bercorak ketimuran, dan tidak agresif sebagaimana nasionalisme yang dikembangkan di Eropa.⁵⁴

Kemudian terkait dengan nasionalisme, terdapat beberapa kiai yang menyamakan antara nasionalisme atau rasa kebangsaan dengan asy-syu'ubiyah yaitu KH. Hasymi Arkhas, KH. Yasri Marzuki, dan KH. Zuhdi Zaini mendefinisikan nasionalisme sama dengan inti dari kosa kata asy-syu'ubiyah sebagaimana tersurat dalam QS. Al-Hujurat (49): 13. Bagi mereka, nasionalisme atau asy-syu'ubiyah sebenarnya dapat diartikan dengan rasa kebangsaan dari setiap warga negara terhadap negaranya.⁵⁵

Selanjutnya KH. Hasymi Arkhas menambahkan bahwa nasionalisme sebagai wilayah spiritual dan komitmen moral yang oleh NU sumber inspirasinya berasal dari (1) ikut merasa suka dan duka atas nasib yang menimpa umat sebangsa dan setanah air, (2) siap meleburkan diri dengan kelompok lain demi kepentingan nasional, yang pada zaman dahulu telah dibuktikan oleh para kiai dalam laskar Hisbullah dan Sabilillah, (3) semangat bersatu demi keutuhan bangsa dan kedaulatan negara, dan (4) menjunjung prinsip budaya “membedakan hak pribadi berupa keyakinan agama dengan hak negara”.⁵⁶

Sebuah negara-bangsa (nation-state) akan berdiri kokoh jika memiliki landasan yang kuat, yaitu ideologi yang merupakan pemersatu, perekat, dan pengikat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Para pendiri Republik Indonesia telah berhasil meletakkan dasar negara yang kuat dan kokoh, yaitu Pancasila.

Pancasila dipersiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mempunyai enam puluh orang anggota. Akan tetapi, hanya sembilan orang dari mereka yang dijadikan Panitia Kecil untuk merumuskan Pancasila sebagai perwujudan dari tujuan dan maksud didirikannya Indonesia merdeka. Kesembilan orang tersebut adalah; Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin,

Ahmad Soebardjo, AA. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Abdul Wahid Hasyim, Agus Salim, dan Abikusno Tjokro Sujoso.⁵⁷

Dalam Panitia Sembilan tersebut, paling tidak ada tiga kiai yang mempunyai andil besar dalam menyusun Pancasila. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika terdapat delapan kosa-kata dari khazanah Islam yang masuk dalam Pancasila, yaitu: adil, beradab, kerakyatan, hikmat, permusyawaratan, perwakilan; dan terulangnya kosa-kata “adil dan rakyat” dalam sila kelima dari Pancasila.

Seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali menyambut dengan gembira Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Sebagaimana diketahui, BPUPKI telah menyiapkan dasar negara, yaitu Pancasila. Menurut rumusan awal, sila pertama berbunyi: “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Rumusan itu ditolak oleh golongan minoritas non-muslim, dan akhirnya wakil-wakil kelompok Islam menyetujui usul penghapusan anak kalimat tersebut dari Pancasila dan batang tubuh pembukaan UUD 1945. Akan tetapi, sila pertama tersebut mendapat tambahan kata kunci sehingga menjadi: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵⁸

Dengan demikian, moral pancasila yang pertama adalah keyakinan dan kerukunan sebagai wujud nyata dari ketaqwaan dan keimanan terhadap eksistensi terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meyakini adanya zat yang Maha Kuasa yang meyakini kebenaran dan dibawakan serta diajarkan oleh para Nabi dan Rasul-Nya. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diyakini kebenarannya adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dirumuskan para pendiri negeri ini, yaitu pancasila. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multi agama. Kerukunan antar umat beragama, inter umat beragama dan umat beragama dengan pemerintah adalah kunci keberhasilan untuk mencapai masyarakat adil, makmur, aman, dan sejahtera.⁵⁹

Sebagaimana pula dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, telah tercantum

⁵⁴ Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayana, *Cerdas, Kritis, dan Aktif...*, h. 40

⁵⁵ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai...*, h. 236

⁵⁶ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai...*, h. 237

⁵⁷ Supartono Widyosiswoyo, *Sejarah*, (Klaten, Intan, 1979), h. 187

⁵⁸ Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai...*, h. 120

⁵⁹ Maswardi Muhammad Amin, *Pendidikan Karakter Anak Bangsa*, (Jakarta: Baduose Media, 2011), h. 97

pada bab XI tentang agama dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".⁶⁰

Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 'ashabiyah diartikan oleh Ibnu Khaldun sebagai solidaritas sosial. Menurut Ibnu Khaldun solidaritas sosial atau rasa golongan yang dihubungkan oleh pertalian darah atau pertalian lain yang mempunyai arti dan tujuan yang sama. Hal ini disebabkan karena pertalian darah mempunyai kekuatan mengikat pada kebanyakan manusia, yang membuat mereka ikut merasakan tiap kesakitan yang menimpakannya. Ashabiyah adalah perasaan satu kelompok atau solidaritas sosial, yang timbul secara alamiah dalam kehidupan manusia karena adanya pertalian darah atau pertalian perkauman. Perasaan cinta kasih tersebut menimbulkan perasaan senasib, sepenanggungan, rasa saling setia, rasa saling membutuhkan, terlebih pada saat menghadapi musibah atau ancaman musuh, atau untuk mencapai tujuan tertentu.

Kemudian Ibnu Khaldun berpendapat, orang tidak mungkin menciptakan negara tanpa dukungan rasa persatuan dan solidaritas yang kuat. Proses pendiriannya memerlukan perjuangan sungguh-sungguh, suatu pertarungan hidup dan mati. Solidaritas ('ashabiyah) pada pokoknya adalah kerjasama dan tolong menolong yang erat dalam suatu kelompok yang berbentuk sedemikian rupa sehingga anggota kelompok itu masing-masing bukan saja bantu membantu, tetapi bersedia mengorbankan jiwa untuk kepentingan bersama. Dan ini menurutnya adalah suatu gejala alami bagi manusia dalam proses berdirinya negara.

Akan tetapi peran agama dalam mendirikan dan memperkuat negara amatlah penting bagi Ibnu Khaldun. Sebab, agama (Islam) sanggup menyatukan berbagai pendapat dan membuat negara lebih kuat. Begitu halnya dengan nasionalisme Indonesia, yang menjadi perekat antar bangsa Indonesia ialah agama khususnya

Islam. Bisa dilihat bahwa dalam Pancasila, sila pertama memiliki makna yang sangat mendalam bagi bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan republik Indonesia berdiri. Agama Islam menjadi perekat seluruh rakyat Indonesia di kala itu. Inilah relevansi diantara 'ashabiyah Ibnu Khaldun dengan nasionalisme Indonesia, yang sama-sama sejatinya dalam pendirian atau terbentuknya negara bangsa tersebut tidak lain adalah adanya peran agama yang sangat dominan di dalam negara.

Daftar Pustaka

- Al-Khudairi, Zainab. 1995. *Filsafat Sejarah Ibn Khaldun*, terj. Ahmad Rafi'. Bandung: Pustaka.
- Abdullah, Taufik. 2001. *Nasionalisme dan Sejarah*. Bandung: Styta Historika.
- Abdul Rozak dan A. Ubaedillah (ed), 2006. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Afan, Gaffar. 1999. *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afandi, Hakimul Ikhwan. 2004. *Akar Konflik Sepanjang Zaman; Elaborasi Pemikiran Ibnu Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- AK. Warul Walidin. 2005. *Konstelasi Pemikiran Pedagogik Ibnu Khaldun Perspektif Pendidikan Modern*. Yogyakarta: Suluh Press.
- Al-Hakim, Suparlan, dkk. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Madani.
- Armaidly Armawi dan Ichlasul Amal (ed). 2000. *Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Azhar, Muhammad. 1996. *Filsafat Politik; Perbandingan Antara Islam Dan Barat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Azyumardi Azra dan Komarudin Hidayat. 2003. *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Dault, Adhyaksa. 2005. *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Furchan, Arief. 1992. *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usana Offset Printing.
- Glase, Cyril. 1999. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁶⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), h. 161

Hariato, Ariel. 1996. Nasionalisme Refleksi Kritis Kaum Ilmuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Harahap, Syahrin. 2000. Metodologi Studi dan Penelitian Ilmu-Ilmu Ushuluddin. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Helmy, Musthafa, dkk. 2017. Risalah NU; Mencerahkan dan Menyejukkan. Jakarta: PBNU.

